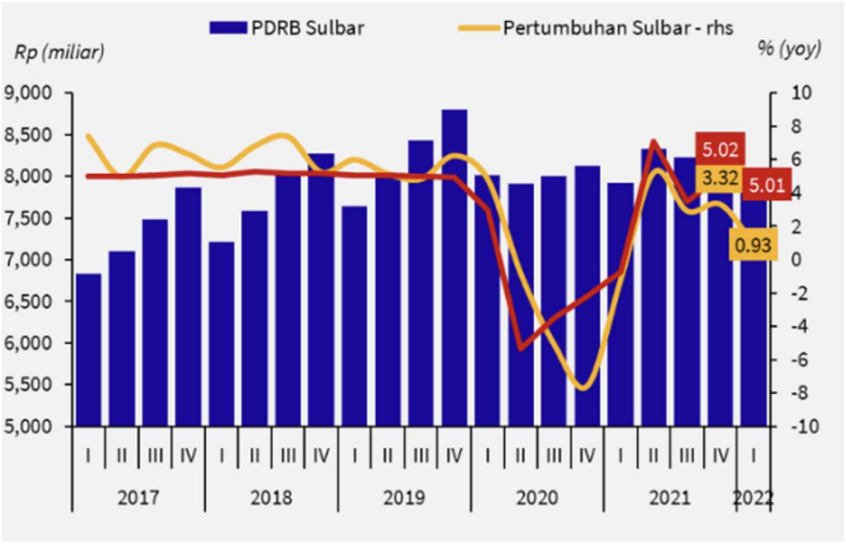
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh melambat pada triwulan I 2022. Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 0,93% (yoy) pada triwulan I 2022 atau lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,32% (yoy) bisa kita lihat di *Gambar 1,* Meskipun begitu, konsumsi masyarakat tumbuh lebih tinggi sejalan dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Kemudian, kinerja investasi akan ditopang oleh konstruksi pengembangan beberapa proyek Infrastruktur.

Gambar 1
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat



Pada saat ini, dunia sedang memasuki era ekonomi gelombang ke empat yang dinamakan dengan era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan manifestasi dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Ekonomi kreatif ini ditopang oleh industri kreatif. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sampai bulan Juli 2022, jumlah UMKM mencapai 130 juta lebih dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga berkontribusi dalam menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia dan mempunyai porsi investasi sebesar 60,4 persen.

Gambar 2
Jumlah UMKM se-Indonesia

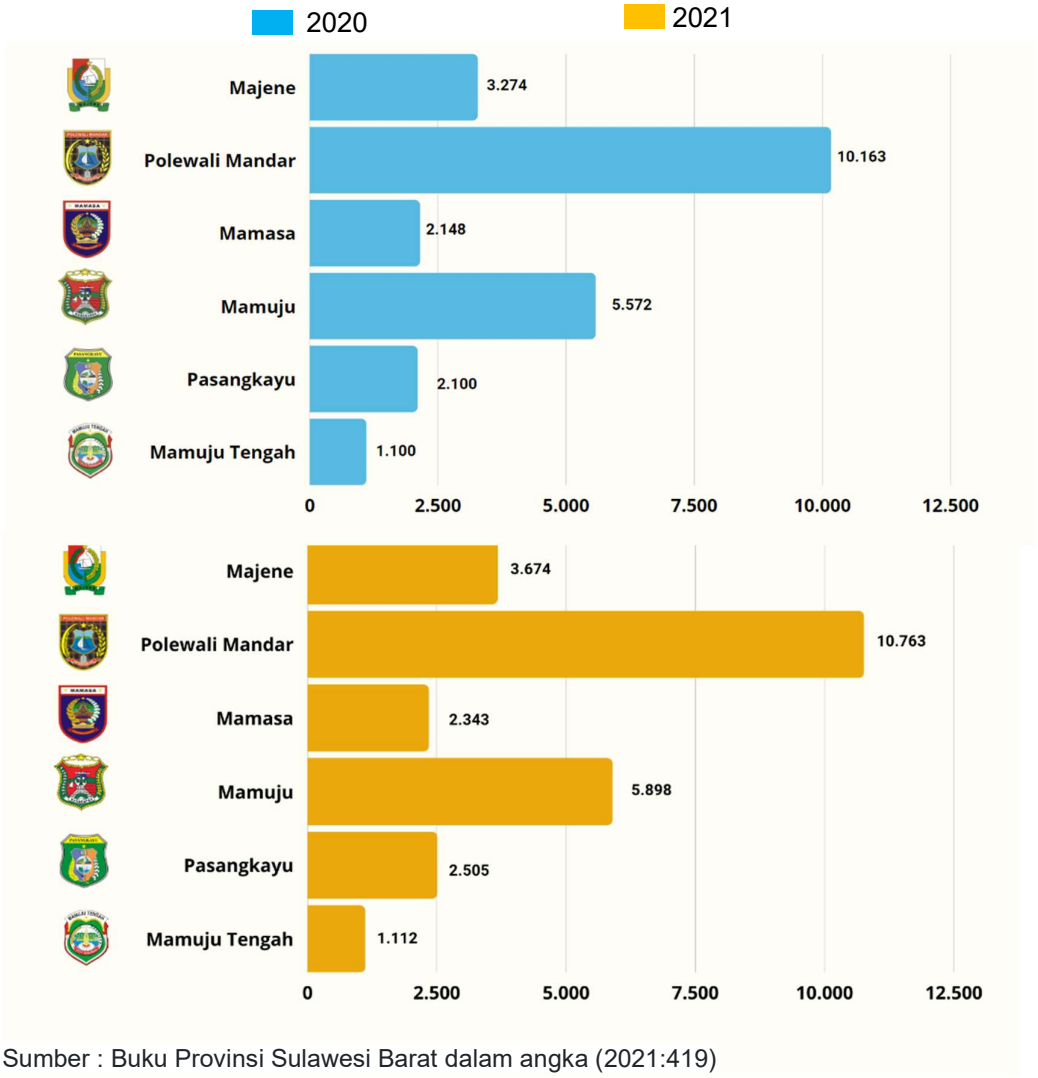


Sumber : https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm_ dashboard/

Dari sumber data mengenai Jumlah UMKM yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 3 Juta lebih UMKM yang

beredar di Provinsi Sulawesi Barat. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak khususnya pada masa krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1998. Sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 3
Jumlah UMK Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Buku Provinsi Sulawesi Barat dalam angka (2021:419)

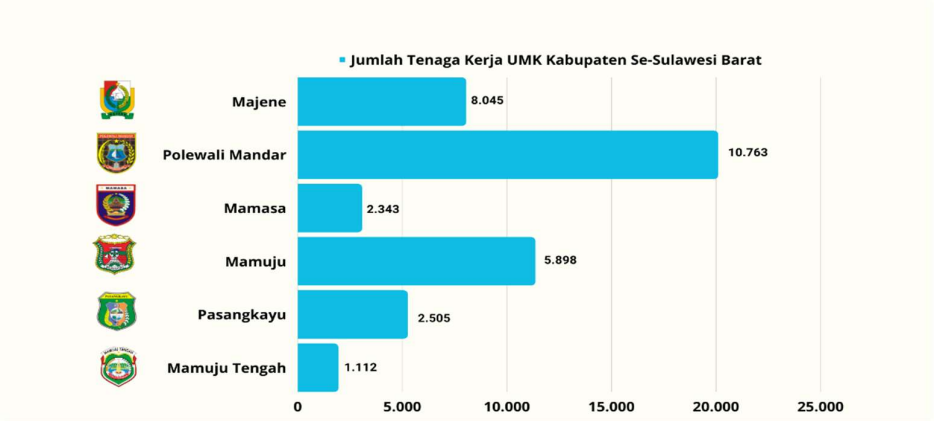
Berlakunya pasar perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di kawasan Asia Tenggara mendorong pelaku UMKM untuk berbenah. MEA merupakan lintas perdagangan dinegara-negara ASEAN yang membebaskan aliran barang dan jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja. Adanya perdagangan global ini menuntut pelaku UMKM untuk melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan daya saing. Pembenahan kompetensi sumber daya manusia khususnya. Rendahnya tingkat pendidikan formal (yang umum digunakan sebagai indikator tingkat keahlian) pelaku UMKM merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas kinerja atau daya saing UMKM di Indonesia.

Di Indonesia jumlah UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah ini harus diikuti dengan peningkatan produktivitas yang berdampak pada kinerja UMKM dan kesejahteraan pelaku UMKM. Di Kabupaten se-Sulawesi Barat seperti yang terlihat di Gambar 2 kabupaten yang memiliki UMK paling banyak ialah Kabupaten Polewali Mandar sedangkan di ibu kota Provinsi hanya mempunyai kurang lebih 5000 UMK yang beroperasi.

Disamping keberadaannya yang sangat positif dan potensial, UMK memiliki beberapa kendala usaha baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kualitas tenaga kerja (SDM), jika dilihat dari tingkat pendidikan atau keahlian pekerja yang masih rendah, tingkat

kewirausahaan yang kurang, dan kendala permodalan.

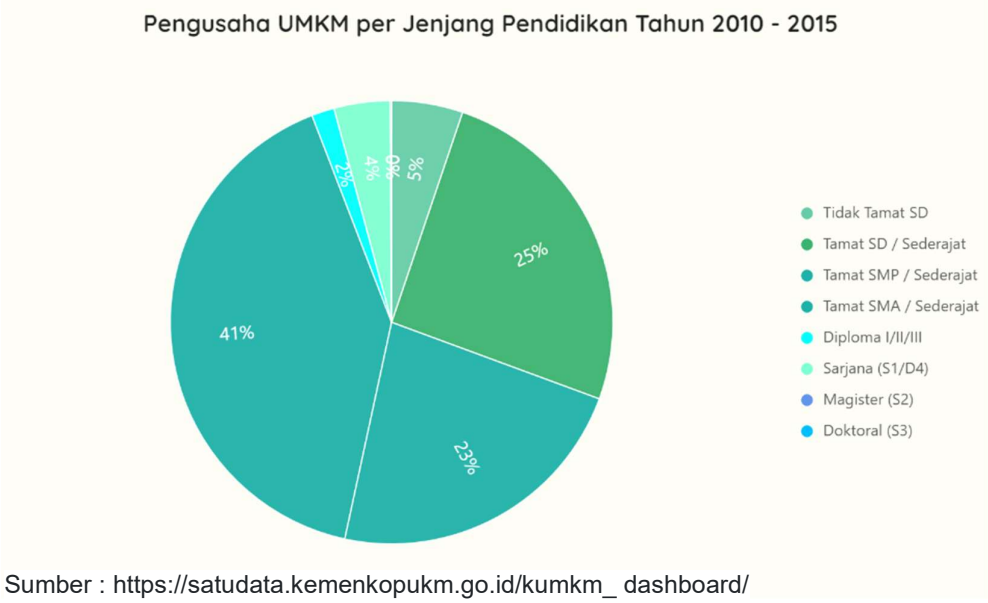
Gambar 4
Jumlah Pelaku / Tenaga Kerja UMKM Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Buku Provinsi Sulawesi Barat dalam angka (2021:419)

Seperti gambar 4 menunjukkan bahwa tenaga kerja pelaku UMK di Provinsi Sulawesi Barat mencapai Kurang lebih 49 Ribu Pekerja sehingga sangat penting Modal intelektual yang terdiri dari sumber daya manusia *(human capital)* sebagai aset tak berwujud menjadi salah satu faktor penentu dalam sebuah keberhasilan bisnis.

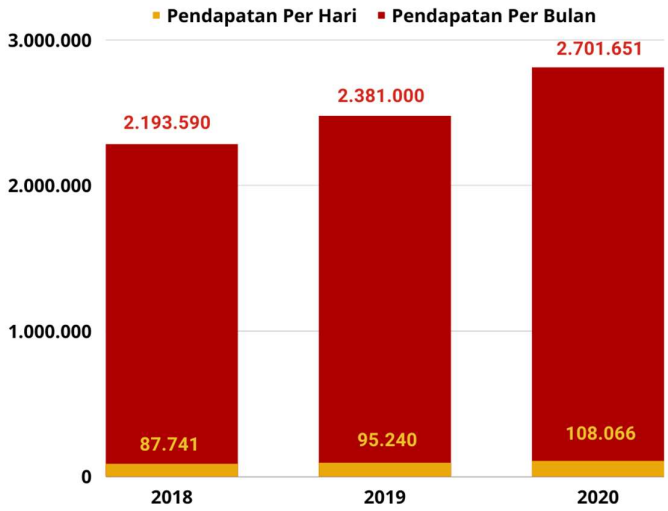
Gambar 5
Pengusaha UMKM per Jenjang Pendidikan



Sumber : https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm_ dashboard/

Kita bisa melihat dari gambar 5 bahwa Pengusaha UMKM di Indonesia dilihat dari jenjang pendidikannya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 didominasi oleh Tamatan SMA sebanyak 41%. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan syarat mutlak dalam pencapaian tujuan. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha mempengaruhi kinerja usaha.

Gambar 6
Pendapatan per Kapita Tenaga Kerja Sulawesi Barat



Sumber : Buku Provinsi Sulawesi Barat dalam angka (2021:124)

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah, dengan pendidikan yang rendah sehingga masyarakat Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga banyak masyarakat yang tingkat kesejahteraannya di bawah katagori kesejahteraan rendah yang membuat masyarakat bekerja di luar daerah yang terlihat sesuai dengan gambar 6. Hal tersebut membuat masyarakat membutuhkan lapangan pekerkaan sesuai dengan pendidikan. Seperti halnya banyaknya usaha mikro dan kecil yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya

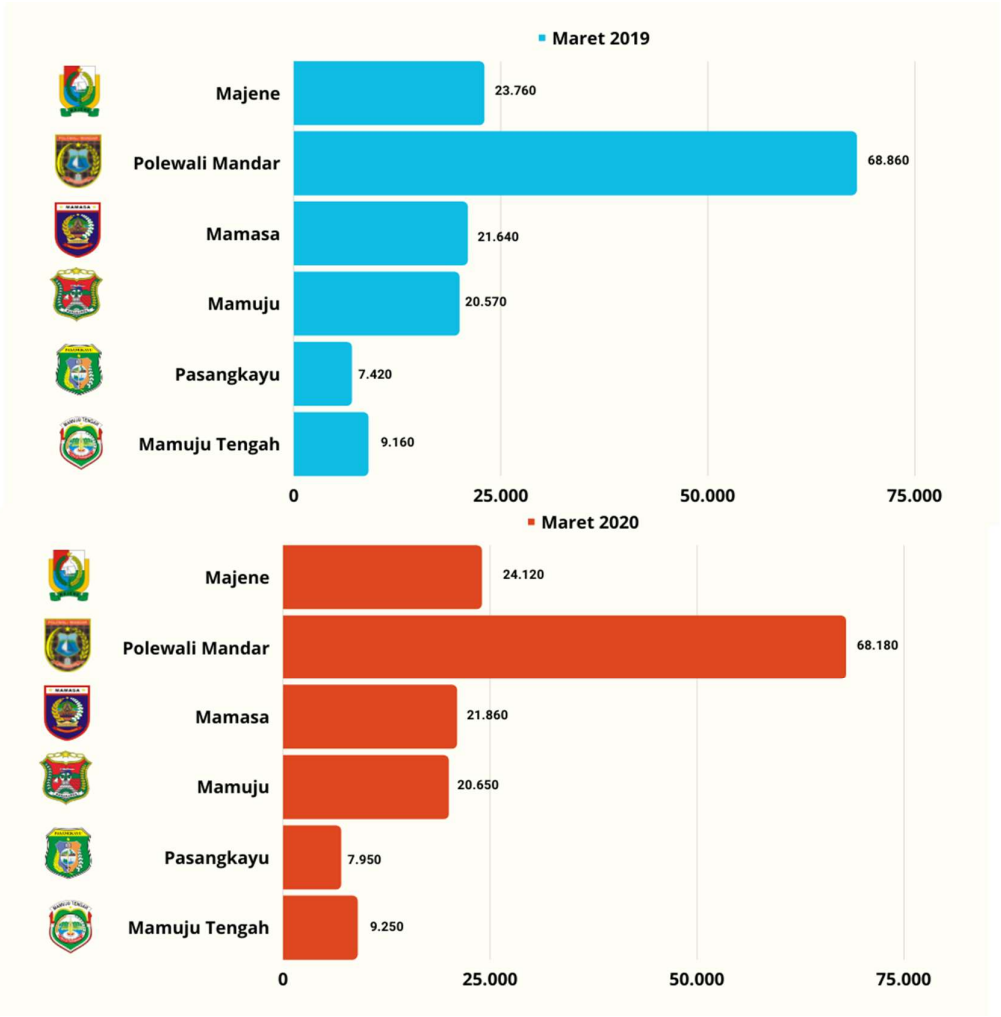
diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai macam pihak, kesejahteraan merupakan fatamorgana.

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan dari sila ke-lima Pancasila yang lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya dipratekkan secara konsekuen baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini. Pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai hanya sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembagunan ekonomi karena penanganan kendala pembangunan masih belum menyentuh persoalan mendasar. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunan, antara lain kurangnya Infrasturkur Fisik, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya.

Ketersediaan lapangan kerja menurun pada triwulan I 2022. Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan lalu di Sulawesi Barat berada pada level 78 dimana sebelumnya pada triwulan IV 2021 mampu mencapai level 102. Kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya pembukaan kembali lapangan kerja pascagempa bumi yang

melanda Kab. Mamuju dan Kab. Majene di Januari 2021 silam dan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik, namun belum signifikan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat.

Gambar 7
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Buku Provinsi Sulawesi Barat dalam angka (2021:71)

Di Provinsi Sulawesi Barat ada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Modal Bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Serta Industri Kecil dan Menengah Terdampak *Corona Virus Disiase 2019* dalam rangka pemulihan ekonomi

Keberadaan UKM hendaknya diharapkan dapat memberi konstribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan seperti yang terlihat dalam gambar 6, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. Meningkatnya kemiskinan pada saat krisis ekonomi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan output bagian UKM. Pembangunan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu penggerak yang krusial.

Masyakarat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin

atau rehabilitas masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan "Pemberdayaan" masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi roduktif dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan indikasi permasalahan di atas terkait dengan Kesejahteraan Masyarakat dan Usaha Mikro dan Kecil maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tersebut, dengan judul "Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terjadi Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melalui Usaha Mikro dan Kecil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melalui Usaha Mikro dan Kecil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu administrasi terapan khususnya tentang ilmu Kebijakan Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga atau masyarakat dan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang manfaat yang akan diperoleh pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha mikro dan kecil.